

**SKRIPSI**

**PERAN PENDIDIKAN POLITIK IKATAN MAHASISWA  
MUHAMMADIYAH (IMM) DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018  
(STUDI KASUS DPD IMM)**

***ROLE OF POLITICAL EDUCATION IN MUHAMMADIYAH (IMM)  
STUDENTS COMMITMENT IN THE NTB PILGUB 2018  
(IMM DPD CASE STUDY)***



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019**

**SKRIPSI**

**PERAN PENDIDIKAN POLITIK IKATAN MAHASISWA  
MUHAMMADIYAH (IMM) DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018  
(STUDI KASUS DPD IMM)**

***ROLE OF POLITICAL EDUCATION IN MUHAMMADIYAH (IMM)  
STUDENTS COMMITMENT IN THE NTB PILGUB 2018  
(IMM DPD CASE STUDY)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun oleh:

**IRAWAN**  
**NIM: 21513A0047**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI  
PERAN PENDIDIKAN POLITIK IKATAN MAHASISWA  
MUHAMMADIYAH (IMM) DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018  
(Studi Kasus DPD IMM NTB)**



Disusun dan diajukan oleh

**IRAWAN**

**NIM:21513A0047**

**PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN**

Skripsi ini telah di setujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke sidang panitia  
ujian skripsi pada:

Mataram, 08 Agustus 2019

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Darmansyah, M.Si**

**NIDN. 0008075914**

**Iskandar, S.Sos., MA**

**NIDN. 0802048904**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP**

**NIDN.0816057902**

**LEMBAR PERNGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN PENDIDIKAN POLITIK IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**  
**(IMM) DALAM PILGUB NTB 2018**  
**(Studi kasus DPD IMM NTB)**



Disusun dan diajukan oleh

**IRAWAN**

**NIM.21513A0047**

Skripsi atas nama Irawan telah di pertahankan di depan dosen penguji program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu pemerintahan dan ilmu politik Universitas muhammadiyah mataram. Pada hari/tanggal: Sabtu, 10 agustus 2019

**Dosen Penguji,**

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** Ketua (.....)  
NIDN. 0008075914
2. **Iskandar, S.Sos.,MA** Anggota 1 (.....)  
NIDN. 0802048904
3. **Drs. H. Abdurrahman, MM** Anggota II (.....)  
NIDN.0804116101

**Mengesahkan,**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

**Drs. AMIL, M.M**  
**NIDN. 0831126204**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Mataram , 10 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



**IRAWAN**  
**NIM: 21513A0047**

## **MOTTO**

**Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan**

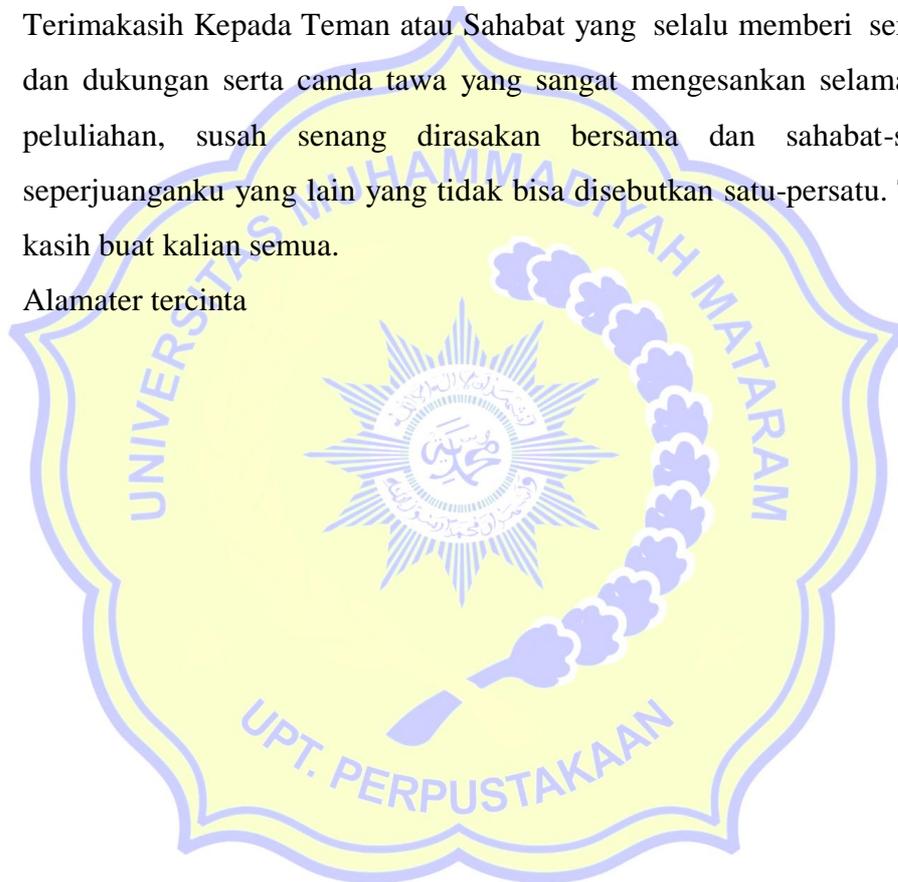
**BY**

**(IRAWAN)**



## PERSEMBAHAN

1. Terimakasih Kepada kedua orang tua ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. Terimakasih Kepada saudaraku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya..
3. Terimakasih Kepada Teman atau Sahabat yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa peluliah, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Tuhan yang maha pengasih yan tak pernah pilih kasih Tuhan yang maha penyayang yang kasih dan sayangnya tiada terbilang kepada kita sekalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Peran Pendidikan Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dalam Pilgub Ntb Tahun 2018 (Studi Kasus DPD IMM)**” Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat

1. Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Drs. H. Muhammad Junaidi, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.I.P, Selaku Kapordi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Drs. H.Darmansyah,M.Si Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Drs. Iskandar,S.Sos.,MA Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang selalu memberikan doa dan motivasi dan dukungan kepada saya selama ini
7. Para dosen yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan.
8. Dan semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu.

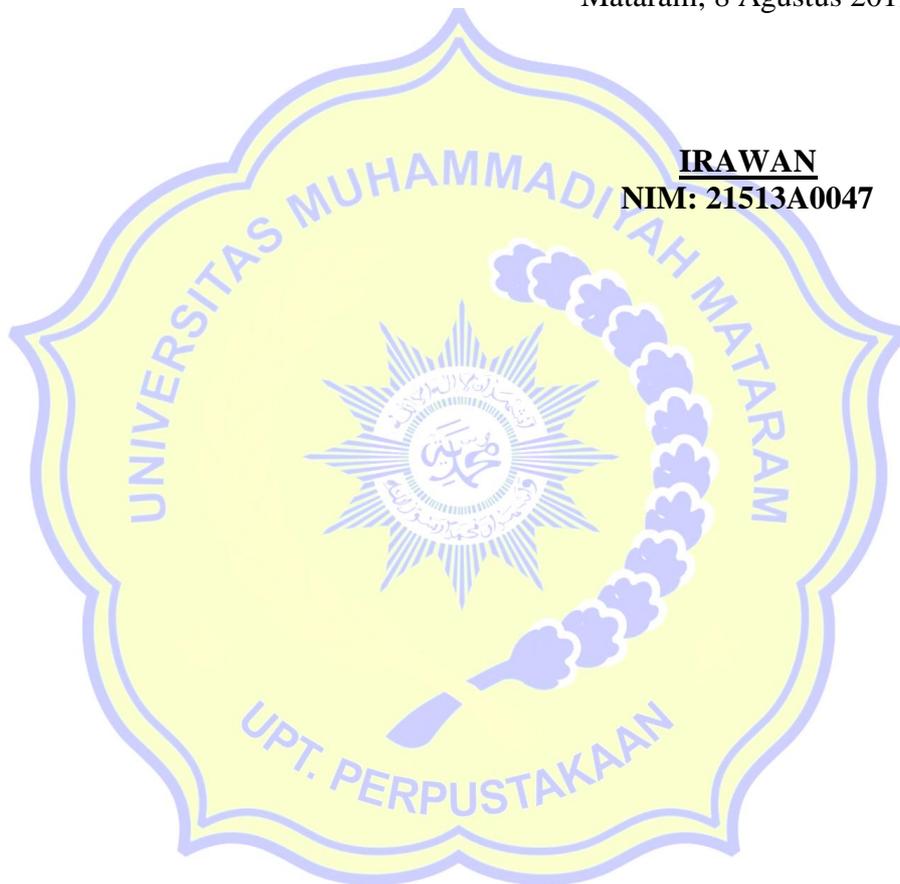
Kepada semuanya, penulis mengucapkan terimakasih disertai doa semoga semua kebbaikannya diterima sebagai amal sholeh dan mendapat balasan berlipat

dari-Nyaserta proses yang selamaini penulis alami semoga bermanfaat dikemudian hari sebagai bekal mengarungi hidup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Amiin.

Mataram, 8 Agustus 2019

**IRAWAN**  
**NIM: 21513A0047**



## ABSTRAK

### PERAN PENDIDIKAN POLITIK IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018 (STUDY KASUS DPD IMM NTB)

IRAWAN

NIM: 21513A0047

**Dosen Pembimbing I : Drs. H.Darmansyah,M.Si**

**Dosen Pembimbing II : Iskandar,S.Sos.,MA**

IMM adalah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan juga harus terus mengembangkan diri serta mencetak kader-kader yang berkualitas sehingga mampu berkontribusi langsung dalam pembangunan manusia guna menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dan membentuk mahasiswa yang memahami nilai-nilai politik kebangsaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peran DPD IMM NTB melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa dan (2) untuk mengetahui bentuk pendidikan politik IMM kepada mahasiswa dalam Pilgub NTB tahun 2018.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan informan adalah (a) DPD IMM NTB Tahun 2016/2018, (b) alumni DPD IMM NTB, dan (c) cabang IMM Kota Mataram Tahun 2018, dan Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, Dokumentasi, sedangkan tehnik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa IMM dalam upaya pembentukan budaya politik Pancasila bagi mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur adalah dengan melakukan melalui diskusi, demokrasi, sosialisasi dan partisipasi, (2) bentuk pendidikan politik IMM kepada mahasiswa dalam Pilgub adalah Bentuk partisipasi politik IMM yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara, Selain pemberian suara bentuk lain partisipasi pemilihan muda Kota Mataram ketika Pilgub 2018 lalu adalah ikut dalam diskusi-diskusi politik dan (3) kendala yang muncul adalah rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengikuti upaya penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh IMM. Apatisme mahasiswa disebabkan faktor kurang pedulinya mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan. Kendala lain yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh IMM adalah kurangnya instruktur yang diberikan. DPD IMM NTB yang baru berdiri beberapa tahun menyebabkan kurangnya instruktur dalam upaya penyelenggaraan pendidikan politik.

**Kata kunci: Peran IMM, Pendidikan politik, Pilgub**

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF POLITICAL EDUCATION IN MUHAMMADIYAH (IMM) STUDENTS COMMITMENT IN THE NTB PILGUB 2018 (CASE STUDY DPD IMM NTB)***

**IRAWAN  
NIM: 21513A0047**

*Supervisor I: Drs. H.Darmansyah, M.Sc.  
Supervisor II: Iskandar, S. Sos., MA*

*IMM is a student and youth organization must also continue to develop themselves and produce quality cadres so that they are able to contribute directly in human development to create a conducive climate of democracy and form students who understand the political values of nationalism. The objectives of this study are: (1) to determine the role of the DPM IMM NTB in conducting political education to students and (2) to find out the form of IMM political education to students in the NTB Pilgub in 2018.*

*Types of qualitative research with descriptive methods with informants are (a) DPM IMM NTB in 2016/2018, (b) alumni of DPM IMM NTB, and (c) IMM branch in Mataram City in 2018, and data collection techniques are Observation, Interview, Documentation, while data analysis techniques are data reduction, data presentation and verification.*

*The results of this study indicate that: (1) the role of political education carried out by IMM student organizations in the effort to form a Pancasila political culture for students in regional elections or governor elections is through discussion, democracy, socialization and participation, (2) forms of education IMM politics for students in Pilgub is the most common form of political participation IMM is voting whether to elect a candidate for the people's representatives or to elect a head of state, In addition to voting other forms of participation of young Mataram City voters when the 2018 Pilgub was participating in political discussions and (3) obstacles that arise are the low level of student participation in following the efforts to organize political education conducted by the IMM. Student apathy is caused by the lack of concern from students towards student organizations. Another obstacle that arises in organizing political education conducted by IMM is the lack of instructors provided. The NTD IMM DPD, which had only been established for a number of years, led to a lack of instructors in the organization of political education.*

***Keywords: Role of IMM, political education, Pilgub***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Demokrasi.....	5
2.2 Pengertian politik.....	12
2.3 Pendidikan Politik.....	15
2.3.1 Pengertian Pendidikan Politik.....	15
2.3.2 Fungsi Pendidikan Politik.....	19
2.3.3 Tujuan Pendidikan Politik.....	20
2.3.4 Bentuk PendidikanPolitik.....	23
2.3.5 Pendidikan Politik di Badan Eksekutif Mahasiswa.....	24
2.3.6 Pendidikan politik dalam konteks Pendidikan kewarganegaraan.....	25
2.4 Pengetahuan dan Partisipasi Politik.....	27
2.5 Pemilih Muda.....	34

2.6 Tri Kompetensi Dasar IMM Sebagai Ideologi Politik .....	36
2.7 IMM Dan Politik: Dari Nalar Ke Aksi.....	40
<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Informan Penelitian .....	43
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	44
3.5 Instrumen Data .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7 Tehnik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Sejarah berdirinya IMM.....	51
4.1.2 Profil Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) .....	54
4.1.3 Tujuan IMM .....	54
4.1.4 Visi, Misi dan Motto .....	57
4.1.5 Struktur Organisasi .....	58
4.1.6 Karakter Responden .....	59
4.2 Peran DPD IMM NTB melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa dalam Pilgub NTB tahun 2018.....	60
4.3 Bentuk pendidikan politik IMM kepada mahasiswa dalam Pilgub .....	79
4.4 Kendala dalam pendidikan politik yang dilakukan DPD IMM NTB dalam pemilihan gubernur .....	84
4.5 Pembahasan .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kota Sukarta pada tanggal 14 maret 1964 atas prakarsa Djasman al kindi, Sudibyo Markus, dan Rausyad soleh, sikap aktivis muda Muhammadiyah yang tidak puas dengan keadaan polarisasi ideologi yang memasukkan paham komunisme dalam berbagai dimensi kehidupan. Secara garis besar latar belakang berdirinya ikatan dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal, Berhubungan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi induk menginginkan pem-binaan atau pengkaderan langsung setingkat mahasiswa untuk mewadahi kader-kader Muhammadiyah yang terbesar di berbagai organ pergerakan seperti HMI. Tidak terwadahnya kader-kader Muhammadiyahakan me-mudahkan paham komunisme mempengaruhi gerakan kemahasiswaan sehingga para kader Muhammadiyah aktif dalam organisasi yang bercorak sosialisme.Faktor eksternal, Idelogi yang melatar-belakangi berdirinya ikatan berkaitan dengan kondisi sosio-historis atau realitas polarisasi idelogi yang ber-agam, bahkan ada upaya pemerintahan dan pihak-pihak tertentu membentuk Nasakom sebagai wadah perkembangan ideologi. Meminjam kalimat kutowijoyo bahwa kesadaran yang menjadi kerangka berpikir ikatan adalah kesadaran ideologi bukan kesadaran ilmu sehingga pemahaman islam pada waktu itu, tidak untuk melakukan objektifikasi terhadap islam tetapi Islam sebagai ideologi (M Abdul Halim Sani,2017: 170).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dipandu oleh beberapa prinsip kerja Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sesuai dengan penegasan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang disampaikan oleh KH. Ahmad Badawi, antara lain, Menegaskan bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah gerakan mahasiswa Islam, Menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah Negara, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliah dan amalan adalah ilmiah menegaskan bahwa amal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah lillahi Ta'ala dan seenantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat (Makhrus Ahmadi Dan Aminuddin Anwar, 2014:76).

Trilogi IMM dalam prespektif gen pemikiran, keberadaan trilogy IMM yang selama ini menjadi nilai agung, suda seharusnya mulai digeser pendekatan mulai digeser menjadi pola pendekatan (motofogi) dalam melakukan internalisasi kepada kader ikatan, tanpa menghilangkan esensi dari nilai agung tersebut. Trilogi ikatan di bagi menjadi tiga faktor yang pertama, religiusitas, intelektualitas, dan humanitas bukan hanya menjadi bentuk nilai yang lebih menekankan pada pendekatan normative analisis, melainkan menjadi progresif-kritis. (Makhrus Ahmadi Dan Aminuddin Anwar, 2014:227).

IMM adalah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan juga harus terus mengembangkan diri serta mencetak kader-kader yang berkualitas sehingga mampu berkontribusi langsung dalam pembangunan manusia guna menciptakan

iklim demokrasi yang kondusif dan membentuk mahasiswa yang memahami nilai-nilai politik kebangsaan. Maka perlu orang-orang intelektual untuk memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan politik kebangsaan terhadap masyarakat. Dalam hal ini keterlibatan DPD IMM NTB ikut turut mensosialisasikan nilai-nilai politik kebangsaan terhadap mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua DPD IMM NTB terkait dengan peran pendidikan politik kebangsaan dalam pilgub NTB. Dalam hal ini DPD IMM NTB, pernah melakukan kerjasama dengan bawaslu NTB yaitu melakukan seminar di gedung rektor lantai tiga Universitas Muhammadiyah mataram dan pernah menjadi relawan pemilu partisipan Lombok raya. (mataram, 21-12-2018) dari paparan di atas menjelaskan bahwa ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) dan seluruh kadernya Se-NTB tentunya terlibat dalam hal memberikan pemahaman pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai sesuai dengan basis dasar trilogy ikatan.

Masalah yang disampaikan oleh ketua DPD IMM NTB yaitu mahasiswa yang jauh dari kampung meninggalkan kartu pemilih atau KTP maka akan berakhir pada golput

Melihat paparan di atas terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD IMM NTB TAHUN 2018, belum maksimal karena tidak didukung program kerja DPD IMM NTB TAHUN 2018, tersendiri yang mengatur peran pendidikan politik kebangsaan di pembahasan musda DPD IMM NTB TAHUN 2018 tersebut dan peneliti tertarik mengatit judul “Peran Pendidikan Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Imm) Dalam Pilgub NTB Tahun 2018 (Study Kasus DPD IMM NTB)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik meneliti peran pendidikan politik kebangsaan dalam pilgub NTB tahun 2018 oleh DPD IMM NTB diantaranya:

1. Bagaimanakah peran DPD IMM NTB melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa dalam Pilgub NTB tahun 2018.
2. Bagaimanakah bentuk pendidikan politik IMM kepada mahasiswa dalam Pilgub NTB tahun 2018?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

2. Untuk mengetahui peran DPD IMM NTB melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa dalam Pilgub NTB TAHUN 2018.
3. Untuk mengetahui bentuk pendidikan politik IMM kepada mahasiswa dalam Pilgub NTB tahun 2018.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini :

1. Manfaat secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu politik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi DPD IMM NTB.

3. Manfaat bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan politik DPD IMM NTB dalam pilgub tahun 2018.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/cratein*” yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata “*demos*” biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin, kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan Dahl (dalam Yudi Latif, 2011:395). Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Azymuardi, 2012:110).

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2013). Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:

- a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.
- b. Musyawarah.
- c. Pertimbangan moral.
- d. Permufakata yang jujur dan sehat.

- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi.
- f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing.
- g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi.

Demokrasi muncul bukan secara tiba-tiba, melainkan dengan suatu proses yang panjang. Dalam proses tersebut terdapat faktor pendukung yang mendukung tumbuhnya demokrasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia antara lain:

- a. Pendidikan politik/pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara, sebagai basis sumber daya politik.
- b. Ormas dan parpol, untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi.
- c. Pemilu yang Luber dan Jurdil, merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat.
- d. Perwakilan politik/DPR, MPR, secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka.
- e. Pemerintah yang bertanggung jawab
- f. Sistem peradilan yang independen.
- g. Pers dan media massa yang independen (Cholisin, 2013:29).

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu.

Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan system referendum.

1) Demokrasi langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

3) Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan system referendum dan inisiatif rakyat.

c. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

### 1) Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

### 2) Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai-penguasa dengan mengatas namakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

### 3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia (Sulisworo: 2012:12-15).

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep “kewajiban dan keadilan”. Konsep kewajiban bisaanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita di katakana memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi (Jimly

Assidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006:60-61). Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, kama hak adalah kaitan dari kewajiban. John Austin menyebutnya kewajiban relative (*Relative Duty*). Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Hak dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain. Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungan dengan individu tertentu yang ditentukan oleh individu itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki sesuatu atas perbuatan dari orang pertama. Norma hukum hanya menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak secara hukum dalam arti subyektif terkait erat dengan otoritas baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu. Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diterapkan adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama. Keadilan dalam arti legalitas tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu adalah adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum

positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

## 2.2. Pengertian politik

Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti yaitu “segala urusan dan tindakan/kebijaksanaan, siasat dsb) mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik (WJS Poerwadarminta, 2006::24). Dalam kehidupan masyarakat istilah “politik” mula pertamanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “*Politeia*” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” (Deliar Noer, 1982: 11-12). Selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “*Politica*”. Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. (Deliar Noer 2001: 6) menyatakan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan politik, Gabriel A. Almond mengungkapkan: “kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik dalam dua

kategori yaitu fungsi-fungsi masukan (*input function*) dan fungsi-fungsi keluaran (*output function*). Fungsi-fungsi masukan (*input function*) adalah: “fungsi yang sangat penting dalam menentukan cara kerjanya sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik (Moechtar Mas’oed, 2008: 29). Fungsi-fungsi politik dimaksud adalah:

#### 1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Oleh karena itu ia mempelajari kebudayaan kelompoknya dan peranan dalam kelompok. Jadi dengan demikian sosialisasi politik adalah merupakan proses sosial yang menjadikan seseorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut. Dan sosialisasi dilakukan oleh semua unsur dalam masyarakat, misalnya lingkungan pergaulan dan pekerjaan, media massa, keluarga dan sekolah, juga instansi resmi. Dengan demikian kebudayaan politik dapat berkembang dan terpelihara sampai pada generasi berikutnya.

#### 2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik dimaksudkan adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Menurut Gabriel A. Almont setiap sistem politik mempunyai cara tersendiri dalam merekrut warganya untuk menduduki kedudukan politik dan administrasi.

### 3. Artikulasi Kepentingan

Fungsi ini merupakan suatu proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dengan melalui kelompok kepentingan yang dibentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama, kadang-kadang rakyat secara langsung menyatakan keinginannya kepada pejabat pemerintahan.

### 4. Agresi Kepentingan

Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jelas dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut politik kebijaksanaan tertentu. Agresi kepentingan dapat diselenggarakan oleh seluruh subsystem dari sistem politik seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, media komunikasi, partai-partai politik dan kelompok kepentingan.

### 5. Komunikasi Politik

Fungsi ini merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya. Artinya pihak lain mengambil bagian dalam sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi.

Fungsi-fungsi keluaran (*output functions*), meliputi fungsi-fungsi pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan pengawasan azas pelaksanaan aturan-aturan. Ketiga fungsi ini oleh Gabriel A. Almond sebagai fungsi-fungsi pemerintahan dan tidak dibahas lebih lanjut karena pertimbangan ketidakpastian struktur formal pemerintahan umumnya negara-negara non

besar dan penyimpangan besar dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dari konstitusi. Sehubungan dengan hal di atas, di sini Almond mengemukakan bahwa ditinggalkannya fungsi-fungsi ini disebabkan konsep yang diajukannya kekurangan unsur yang esensial sebab fungsi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengertian politik.

## **2.3 Pendidikan Politik**

### **2.3.1 Pengertian Pendidikan Politik**

Istilah pendidikan politik adalah gabungan dari dua kata, yakni pendidikan dan politik. Menurut Susanto (2016:19) bahwa: “inti kegiatan pendidikan sebenarnya, selain menyangkut proses belajar, juga menyangkut *conditioning* dan *reinforcement* terhadap masyarakat”. Sehingga dengan demikian pendidikan ialah merupakan proses belajar seseorang tentang sesuatu serta mempersiapkan kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menghasilkan rangsangan yang akan menghasilkan reaksi atau respon tertentu. Apabila dihadapkan pada konsep pendidikan politik, maka belajar tentang sesuatu diatas diartikan belajar tentang politik Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik, memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan Althoff (2008:22) menganggap bahwa sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses, oleh pengaruh dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik tergantung dari lingkungan tempat individu tinggal maupun kepribadian dari individu tersebut seperti yang

diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2002:27) yaitu sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan social, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu-individu berada ; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sosialisasi Politik sebagai suatu proses belajar tentang politik. Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut, persoalan pokok sosialisasi politik adalah bagaimana seseorang menjadi paham akan politik. Dalam proses belajar politik (*political learning*) terdapat sumber atau agen atau sarana-sarana sosialisasi politik. Adanya beberapa agen sosialisai politik, seperti keluarga, sekolah, kelompok, pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontrak politik langsung. Pentingnya agen-agen atau sarana-sarana sosialisasi-sosialisasi politik, sangat beruntung pada intensitas interaksi individu dengan agen-agen atau sarana-sarana, proses komunikasi, penekunan, dan usia seseorang.

Menurut Supriadi (2001:70) karena kata pendidikan politik dan kata sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hamper sama maka dapat digunakan secara bersangkutan. Alfian (2011:235) juga menganggap bahwa adanya keeratan hubungan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik sehingga ia mengatakan bahwa : “adapun sosialisasi politik ini dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar”.

Mengenai pengertian dari pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) Alfian (2011:235) mengatakan : “dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam system

politik yang ideal yang hendak di bangun “. Hal yang serupa dinyatakan oleh Kartono (2008:64) bahwa : “pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis / moral dalam mencapai tujuan tujuan politik.

Kartaprawira (2004:54) memandang bahwa pendidikan politik yaitu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Dalam kaitan pendidikan politik ini, Djahiri (2012:18) menyatakan bahwa:

“Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa dan Negara dan seluruh perangkat system maupun kelembagaan yang ada”.

Memahami dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa dan negara seluruh perangkat system maupun kelembagaan yang ada, ialah merupakan ciri sudah mulai tertanamnya kesadaran politik. Dengan demikian pendidikan politik berupaya merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik. Memiliki kesadaran politik berarti memiliki keterpaduan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari individu dalam berpolitik. Sehingga dalam Inpres No: 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda Djahiri (2012:2) dijelaskan bahwa :

“Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkain usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaran guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945

sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu system politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien”.

Perilaku politik sebagai hasil pendidikan politik diungkapkan oleh Kenzie dan Silver (Rush dan Althoff, 2008:180) bahwa :

“Perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap social dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapinya. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan social dan tingkah laku politik mungkin adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau yang lebih mungkin lagi kontribusi keduanya”.

Dengan demikian perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi social setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normative diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu.

Dalam hal ini politik dilihat sebagai inti dari proses pendidikan politik yakni membenarkan nilai-nilai dan menerapkannya di masyarakat, sedangkan pendidikan adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Sehingga inti dari proses pendidikan politik yakni membenarkan nilai-nilai dan menerapkannya di masyarakat, sedangkan pendidikan adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Sehingga inti dari proses pendidikan politik yakni internalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mengembangkan pemahaman system politik menuju pembentukan warga negara yang melek politik. Tujuan pendidikan politik untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran politik sehingga terjadi pembaharuan kehidupan politik dalam rangka menciptakan suatu

system politik yang demokratis, Sherman (Affandi 2011:26) melihat sosialisasi politik dalam tiga hal persuasive, yakni perspektif consensus, perspektif konstruksi social tentang realitas dan prespektif humanisme.

### 2.3.2 Fungsi Pendidikan Politik

Pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama yaitu dalam merubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan yang kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Menurut Kartono (2008:57) bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi :

- 1) Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat / struktur kemasyarakatannya.
- 2) Dengan prinsip-prinsip realistic, lebih manusiawi, dan berlandaskan.
- 3) Hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Fungsi pendidikan diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan bagi individu sendiri menurut Kartono (2008:59) ialah :

- 1) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social kedurjanaan,
- 2) Di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu diatas intinya ialah bahwa pendidikan politik berusaha merubah aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari individu. Kartaprawira (2004:54) memandang pendidikan politik sebagai salah

satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Dalam kaitan itu Affandi (2011:27) mengatakan bahwa pendidikan politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungan.

### 2.3.3 Tujuan Pendidikan Politik

Secara formal, maksud diadakannya pendidikan politik menurut inpres No : 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda Affandi (2011:5) ialah:

“Memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut :

- 1) Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai warga Negara terhadap kepentingan bangsa dan Negara.
- 2) Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.
- 4) Memiliki disiplin pribadi, social dan nasional.
- 5) Mendukung system kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
- 6) Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- 7) Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- 8) Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang.
- 9) Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas sejalan dengan Sumantri dan Affandi (2011:126) yang menyatakan bahwa:

“Maksud diselenggarakannya pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia”.

Generasi muda sebagai pewaris cita-cita bangsa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif membangun bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan serta ketrampilan politik sehingga para generasi muda menggunakan pengetahuannya untuk berpolitik secara bertanggung jawab.

Adapun tujuan dari pendidikan politik (Amril, 2016 :104) yaitu :

1. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi social dan fungsi politik, seperti bias kerja sama : bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoism dan menjadi bintang politik).
3. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bias berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik
4. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang actual, lalu berusaha ikut memecahkan; jadi terdapat partisipasi politik. Sebab. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya

5. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses politik dari warga Negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan Negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

Sedangkan Kartono (2008:68) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah :

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya) :
  - Mampu memahami situasi politik penuh konflik
  - Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
  - Aktivasinya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara.
  - Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideology tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan :
  - Peranan insani dari setiap individu sebagai warga Negara (melaksanakan realisasi diri / aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
  - Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, ketrampilan politik)
  - Agar orang bias aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.

Antara fungsi pendidikan politik dan tujuan dari pendidikan politik mempunyai kedekatan tersendiri yang tak dapat dipisahkan dan keberhasilan pencapaian fungsi dan tujuan dari pendidikan politik merupakan keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri. Menurut Alfian (2013:236) untuk menganalisis keberhasilan pendidikan politik dilihat dari dua dimensi, dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang di inginkan, dimensi kedua adalah realitas atau keadaan dari masyarakat itu sendiri yang langsung diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan system politik tadi.

Dihubungkan dengan dimensi yang kedua dalam melakukan analisis keberhasilan pendidikan politik yang ada pada intinya melakukan kaji banding antara tuntutan system politik ideal dengan realitas politik yang sesungguhnya menurut Affandi (2011:28) mutlak diperlukan adanya struktur baku system politik yang dicita-citakan, yakni system politik yang mencerminkan nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi masyarakat sekaligus dasar untuk membina dan mengembangkan diri untuk melibatkan di dalamnya.

#### **2.3.4 Bentuk Pendidikan Politik**

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan didalam sebuah negara. Bentuk pendidikan politik itu sendiri menurut Kuntomijoyo (2004:58) mengatakan sebagai berikut :

“Pendidikan politik formal, yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal, seperti pertukaran pemikiran melalui mimbar bebas. Sedangkan pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol- simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa”.

Apabila dihubungkan dengan macam bentuk pendidikan politik di atas, bentuk pendidikan politik yang diemban media massa dalam hal ini, yaitu surat

kabar dan partai politik ialah bukan merupakan bentuk pendidikan politik formal. Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semuanya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa negara.

Kartaprawira (2004:54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Dalam hubungan itu, pola pendidikan politik rakyat yang akan kita selenggarakan di masa depan harus bias mengantarkan kita mewujudkan suatu masyarakat madani, yaitu masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal dan menyerap nilai-nilai demokrasi Indonesia secara konstruktif sehingga dari waktu ke waktu dapat memiliki suatu system yang semakin demokratis. Bukan sebaliknya makin otoritarian, seperti yang terjadi pada masa orde baru.

Secara formalnya maksud diadakannya pendidikan politik menurut Inpres No: 12 tahun 1982 tentang politik generasi muda (Affandi, I. 2011:5) ialah :  
Memberian pedoman kepada generasi muda Indonesia guna

Meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

### **2.3.5 Pendidikan Politik di Badan Eksekutif Mahasiswa**

Draf Amandemen Konstitusi hasil sidang umum 1, Bab IV Tujuan dan fungsi, bagian pertama Tujuan-Pasal 8: "KM UMP bertujuan membentuk

mahasiswa yang berkualitas sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi”. Bagian kedua Fungsi-Pasal 9 :”

Fungsi KM UMP adalah:

1. Wahana pembentukan kepribadian kritis mahasiswa.
2. Wahana pengembangan penalaran dan keilmuan.
3. Wahana advokasi mahasiswa.
4. Wahana pengembangan potensi mahasiswa.
5. Wahana pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa.
6. Wahana pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa.
7. Wahana pendidikan politik mahasiswa.

Hal diatas menunjukan bahwa organisasi KM UMP termasuk di dalamnya Badan Eksekutif Mahasiswa memang mempunyai fungsi sebagai wahana pendidikan politik bagi para mahasiswa, baik anggota lembaga-lembaga maupun organisasi KM UMP secara keseluruhan.

### **2.3.6 Pendidikan politik dalam konteks Pendidikan kewarganegaraan**

Pendidikan politik merupakan suatu proses yang berkenaan dengan psikologi politik. Dalam artian pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku warga negara sehingga sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara atau dapat berpartisipasi dengan kebijaksanaan yang dtetapkan oleh negara. Pendidikan politik tidak berarti menumbuhkan sikap menentang terhadap kebijaksanaan dan peraturan negara. Namun bagaimana caranya menumbuhkan sikap dan ketrampilan politik untuk dapat memahami segala ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah sehingga setiap warga negara dapat turut serta dan bertanggung jawab dalam pelaksanaanya. Pendidikan politik merupakan syarat mutlak bagi timbulnya kehidupan politik yang selaras, serasi, dan seimbang serta dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kehidupan *rule of law*.

Sering disandingkannya pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan politik adalah karena keduanya memiliki beberapa kesamaan. Al Muchtar (2000:145) mengatakan bahwa “pendidikan politik sebagai model yang dikembangkan di Indonesia yang bersumber pada ilmu politik”. Merujuk pada pendapat tersebut dapat terlihat bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai potensi dan posisi yang strategis sebagai pendidikan politik. Salah satunya adalah karena pendidikan kewarganegaraan mendapat pengaruh yang sangat kental dari ilmu politik secara konstan (tetap) selalu memantau perkembangan yang terjadi dalam sistem politik saat ini.

Keterkaitan antara pendidikan politik dengan pendidikan kewarganegaraan sangat terlihat jelas karena salah satu misi yang diemban oleh pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memberikan pendidikan tentang politik adalah untuk membina warga negara Indonesia yang baik dan melek politik. Dalam artian bahwa nantinya warga negara Indonesia akan memiliki berbangsa dan bernegara, sadar akan hak dan kewajiban diri dan sesama pemerintah dan negara, memahami dan berkeinginan kuat dan mampu membina serta menegakan berbagai norma / hukum yang berlaku dalam kehidupan dan juga bertekad mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Menurut Wahab (2006:60-67) bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. PKn berperan membentuk warga negara yang baik sesuai tuntutan/versi para penyelenggara negara.

#### **2.4 Pengetahuan dan Partisipasi Politik**

Pirie dan Worcester (2000) menyebutkan bahwa remaja di Inggris saat ini tidak banyak terlibat dalam politik bila dibandingkan dengan remaja 30 tahun

yang lalu (O'Toole, Lister, Marsh, Jones, & Mc-Donagh, 2003). Selain itu, Pirie dan Worcester juga menemukan bahwa remaja zaman sekarang juga dinilai memiliki pengetahuan politik yang lebih rendah. Pengetahuan politik berperan dalam mengarahkan individu terlibat dalam aksi-aksi politik, seperti ikut dalam pemilihan (Anson 2018). Hal ini karena pengetahuan politik dalam mendorong individu menjadi lebih tertarik masuk kedalam informasi-informasi politik dan kemudian meningkatkan pengetahuannya (Henn & Foard, 2014). Pengetahuan politik yang diperoleh dari informasi-informasi politik itulah yang kemudian dapat menginformasikan kepada individu tentang kegunaan keterlibatan dalam diskusi politik (David, 2009), dan mendorong individu untuk melakukan pencarian informasi tambahan tentang isu politik tertentu (Cowen, 2005).

Rendahnya pengetahuan politik sangat mempengaruhi partisipasi politik. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja enggan berpartisipasi dalam politik. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Henn, Weinstein dan Forrest (2005). Mereka menemukan bahwa remaja tidak memiliki ketertarikan terhadap politik dan berpendapat bahwa politisi dan partai tidak bisa menjawab permasalahan bangsa (Henn dkk, 2005). Dengan kata lain, penelitian tersebut menunjukkan adanya persepsi negatif tentang manfaat politik dan sistem politik memiliki peranan dalam menurunkan partisipasi politik. Sejalan dengan Henn dkk; Pirie dan Worcester (2000) berpendapat bahwa rendahnya partisipasi politik remaja disebabkan oleh dua buah faktor yaitu, tidak adanya keuntungan yang didapat dengan berpartisipasi dan sikap individualis. Pada masa remaja, individu cenderung berorientasi kepada

dirinya sendiri. Sehingga, setiap sikap atau tindakan yang dilakukan harus memberikan keuntungan secara pribadi, begitu juga dalam kaitannya dengan politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Ramlan, 2007:140). Herbert McClosky (dalam Miriam, 2008:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat

melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, *spectator*. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator*. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

*Pertama*, peran KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan

sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.

*Kedua*, peran Partai Politik. Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.” Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.

*Ketiga*, peran media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilu, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan

dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilinya dalam Pemilu. Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Magetan yaitu: stasiun televisi lokal JTV, radio Bagaskara FM, dan koran Jawa Pos. Keempat, peran *Civil Society*. Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah LSM Bangun Magetan Sejahtera dan LSM Magetan Center, Nahdatul Ulama (NU), dan Perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai. Keempat lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yakni melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi.

Menurut Gabriel Almond (dalam Mas'ood dan Mac Andrews 2000 : 67) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Yang termasuk dalam bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti Pemberian suara (voting), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan yang masuk dalam bentuk non konvensional adalah: pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekeasan terhadap harta benda, Menurutnya bentuk partisipasi politik "Konvensional" adalah bentuk partisipasi yang Normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik "Non Konvensional" termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal,

kekerasan dan revolusioner. Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo (2008:370) partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain. Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang di mobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga.

Milbrath sebagaimana dikutip Maran (2001:156-157) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, adalah:

1. Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik.

3. Faktor karakteristik sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Tetapi meningkatnya jumlah pemberi suara secara dramatis di negara-negara bagian selatan Amerika akhir-akhir ini betul-betul akibat dari adanya registrasi yang rapi dan aktivitas pemberian suara di kalangan golongan rakyat berpenghasilan rendah yang secara tradisional apatis. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa menurut mereka faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi partisipasi politik adalah: Tingkat pendidikan, Jenis kelamin, Status sosial ekonomi seseorang, Peran partai politik, aktivitas kampanye, Calon-calon/tokoh politik yang memiliki daya tarik pribadi kuat (kharismatis).

## 2.5 Pemilih Muda

Kata “Muda” adalah belum sampaisetengah umur, atau masih muda (Poerwadarminta, 2006:314). Pengertian generasi muda dapat dibedakan dalam beberapa kategori:

1. Biologi, generasi muda adalah mereka yang berusia 12-15 tahun (remaja) dan 15-30 tahun (pemuda).
2. Budaya, generasi muda adalah mereka yang berusia 13-14 tahun.
3. Kerja, yang dibuat oleh Depnaker adalah yang berusia 18-22 tahun.
4. Kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun
5. Ideologi Politik, generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18-40 tahun.
6. Lembaga dan lingkungan hidup sosial, generasi muda dibedakan menjadi 3 kategori:
  - a. Siswa, yakni usia 6-8 tahun
  - b. Mahasiswa, yakni usia 18-25 tahun
  - c. Pemuda yang berada diluar sekolah / PT berusia 15-30 tahun.

Generasi muda secara umum dapat dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, sebagaimana juga dalam fase-fase lainnya, maka fase generasi muda ini mempunyai cirinya sendiri yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (Kurniadi (1991:103). Ciri yang menonjol dari fase generasi muda ini ialah peranannya dalam masa

peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat, antara lain:

- a. Kemurnian idealismenya.
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru.
- c. Semangat dan pengabdianya.
- d. Spontanitas dan dinamikanya.
- e. Inovasi dan kreatifitasnya.
- f. Keinginan-keinginannya untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri.
- h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Kemudian menurut Rudini dan Hidayat (2004:156) generasi muda adalah sebagai personifikasi dari satu generasi penerus didalam sistem kehidupan politik yang mengacu kepada pelaksanaan demokrasi pancasila, ia mempunyai peranan yang amat strategis.

## **2.6 Tri Kompetensi Dasar IMM Sebagai Ideologi Politik**

Ideologi merupakan sistem-sistem keyakinan yang menjadi prinsip dan pegangan individu dan kelompok tertentu. Sehingga tidak heran ideologi selalu menyertai perjuangan/aktifitas, baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan-keamanan dan lain-lain. (Amirullah, 2016:381). Secara etimologis ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea berasal dari *idein* yang berarti melihat. Idea diartikan sesuatu yang ada didalam pikiran sebagai hasil perumusan

sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedangkan kata logis berasal dari kata logos dari kata leigin yaitu berbicara, jadi secara bahasa idiologi adalah pengucatan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus didalam pikiran.kemudian secara terminologi idiologi adalah cara hidup tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari seorang individu, kelompok atau suatu kelas. (Amirullah, 2016:381)

Dalam konteks relasi IMM dan politik, IMM tentu saja memiliki seperangkat idiologi yang menjadi sistem keyakinan sebagai guide dalam perjuangan politik (baik real politic maupun high politik). Disini yang hendak diangkat adalah tri kopetensi IMM sebagai idiologi politik, dengan kata lain, spirit, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip di dalam tiga pilar kekuatan kader IMM itu harus masuk di dalam alam pikiran jiwa setiap kader ikatan dan bernas dalam setiap rangkaian kehidupan kader IMM, oleh karenanya, menurut heman penulis, konstruksi nalar politik kader tidak boleh jauh dari ketiga pilar tersebut yakni intelektualitas, humanitas, dan spiritualitas. Untuk menjadi negarawan atau leader dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja kaderIMM harus berangkat dengan kekuatan intelektual sebagai lampu yang menerangi jalan. Tanpa kekuatan intelektual sebagai cahaya penerang jalan maka bukan tidak mungkin kader IMM hanya akan melestarikan kebodohan-kebodohan bangsa yang teramat lama sehingga kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan sosial barang yang tak kunjung terwujud atau malah menyumbang kebodohan baru yang menyiksa batin bangsa. (Amirullah, 2016:381)

Selanjutnya, bahwa tidak cukup dengan kemampuan intelektual, kader IMM juga punya seperangkap nilai idiologi yang memberi nafas gerakan yang kita kenal sebagai kekuatan religiulitas spiritualitas. Nafas religius-spiritual inilah yang memberikan suntikan nilai.dengan nilai-nilai bentukan religius-spiritual itu, pada akhirnya tidak hanya bicara jujur tapi bagaimana berlaku jujur, tidak hanya amanat yang dikempanyekan tapi perbuatanlah yang menunjukkan keamanan, ketidakadilan, memperkaya diri, dan berbagai model spiritual crises lainnya bisa dipadamkan dengan pikiran jiwa yang religius-spiritual. Singkatnya, nilai-nilai inilah yang menuntut untuk apa kader ikatan negarawan. Hal ini yang kita sebut sebagai kesadaran berorientasi transendensis. (Amirullah, 2016:381)

Bagaimana selanjutnya adalah humanitas (*humanity*) yang menjadi gagasan besar dalam buku ini. Sebagaimana pada bagian lain buku ini telah dijelaskan secara aksplisit visi kemanusiaan IMM. Namun demikian, dalam konteks relasi IMM dan politik atau nalar politik IMM perlu di tegaskan kembali bahwa hidup dan perjuangan kader IMM lebih khusus lagi dalam lapangan politik (real politik maupun high politiki) semata-mata diorientasikan untuk kepentingan kemanusiaan. Lapangan politik harus menjadi arena untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan. Bukan kepentingan pribadi, bukan juga kelompok, dan bahkan bukan untuk umat (agama) tertentu. pada konteks inilah kehadiran kader IMM di pentas politik tidak hanya untuk kepentingan yang partikularitas dan sektarian tapi hadir untuk kepentingan yang lebih universilitas-egaliterian (Amirullah, 2016:381).

Tentu saja hal di atas bukan sesuatu yang mudah untuk terwujud ketika berhadapan dengan panggung politik (khususnya real politik), banyak yang pesimis bahwa ajaran nilai (religius-spiritual) tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan dinamika politik yang cenderung pragmatis-transaksional. Bahkan agama sekalipun cenderung tidak berdaya ketika berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan politik. Sikap pesimis ini seolah menjadi paradigma baru untuk tidak menyebutnya ideologi baru di kalangan politisi (eksekutif dan legislatif) ditambah dengan sokongan sistem perekrutan kekuasaan atau pemimpin bangsa yang bersifat kapitalistik-liberalistik. Sayangnya, sikap pesimis ini tidak hanya dialami oleh pelaku politik (real politik), tapi juga di rasakan oleh mereka-mereka yang mengkalim dirinya baik, suci, jujur, adil, religius dan sejenisnya yang tidak terlibat secara langsung didalam arena politik (real politik). Mereka beranggapan bahwa siapa pun yang masuk arena politik (real politik) pasti kotor, pasti pragmatis, pasti korupsi dan pasti “tukang ngolah”. Sehingga kesimpulannya, arena politik adalah arena hitam (orang yang tidak benar). Hal inilah yang ditolak keras oleh Amien Rais bahwa sikap yang mengkutuk politik sebagai sesuatu yang kotor adalah sikap yang keliru dan menyeleweng. (Amirullah, 2016: 386-387)

Dengan segala pesimis dan ketidakberdayaan di atas, pertanyaannya, apakah kondisi yang demikian dibiarkan saja sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja atau mungkin menjadi ideologi baru bahwa politik disepakati sebagai arena bagi orang-orang yang menjadi “hitam” atau sebaliknya paradigma optimistik yang seharusnya dikonstruksi bahwa politik harus dijadikan arena dakwah baru (dakwah bissiyah). Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi penting, bagaimana

seharusnya kita menjawab dan menyikapinya. Tentu saja paradigma yang optimis harus terus digalakkan sekuat-kuatnya bahwa dengan berpegang pada kekuatan ideologis (intelektual-religius-spiritual-humanitas) yang berbasis pada orientasi transendensi, kita bisa membangun tatanan kehidupan kebangsaan-kemanusiaan yang lebih baik. (Amirullah, 2016:386-387)

Pada konteks inilah perlu ada seperangkat ideologi yang menjadi prinsip dan pegangan perjuangan. Bagi kader IMM, disamping terpusat pada kesadaran Al-qur'an dan As-sunnah, kita juga memiliki tiga pilar diatas yang merupakan ideologi gerakan kader IMM. Tanpa penjiwaan dari tri kompetensi IMM diatas, maka kita telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hilang bukan karena dihapus di tanfidz, dipedomani organisasi, di SPI atau hilang sebagai ideologi organisasi, tapi kekuatan ideologis itu hilang didalam penjiwaan kita, atau kita sendiri yang mengasingkan diri dari sesuatu yang berharga itu. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, tri kompetensi IMM harus menjadi ideologi "politik" kader IMM untuk menjadi *part of solution* atau *source of solution* ditengah persoalan krisis yang dihadapi bangsa dan kemanusiaan, termasuk krisis yang serius yang dihadapi bangsa saat ini adalah krisis kepemimpinan. Pada konteks inilah jika kita berijtihad menjiwai nilai-nilai tri kompetensi IMM abad 19 hingga saat ini. eksistensi Muhammadiyah yang ditunjukkan dengan spirit dakwah. (Amirullah, 2016:386-387)

## **2.7 IMM Dan Politik: Dari Nalar Ke Aksi**

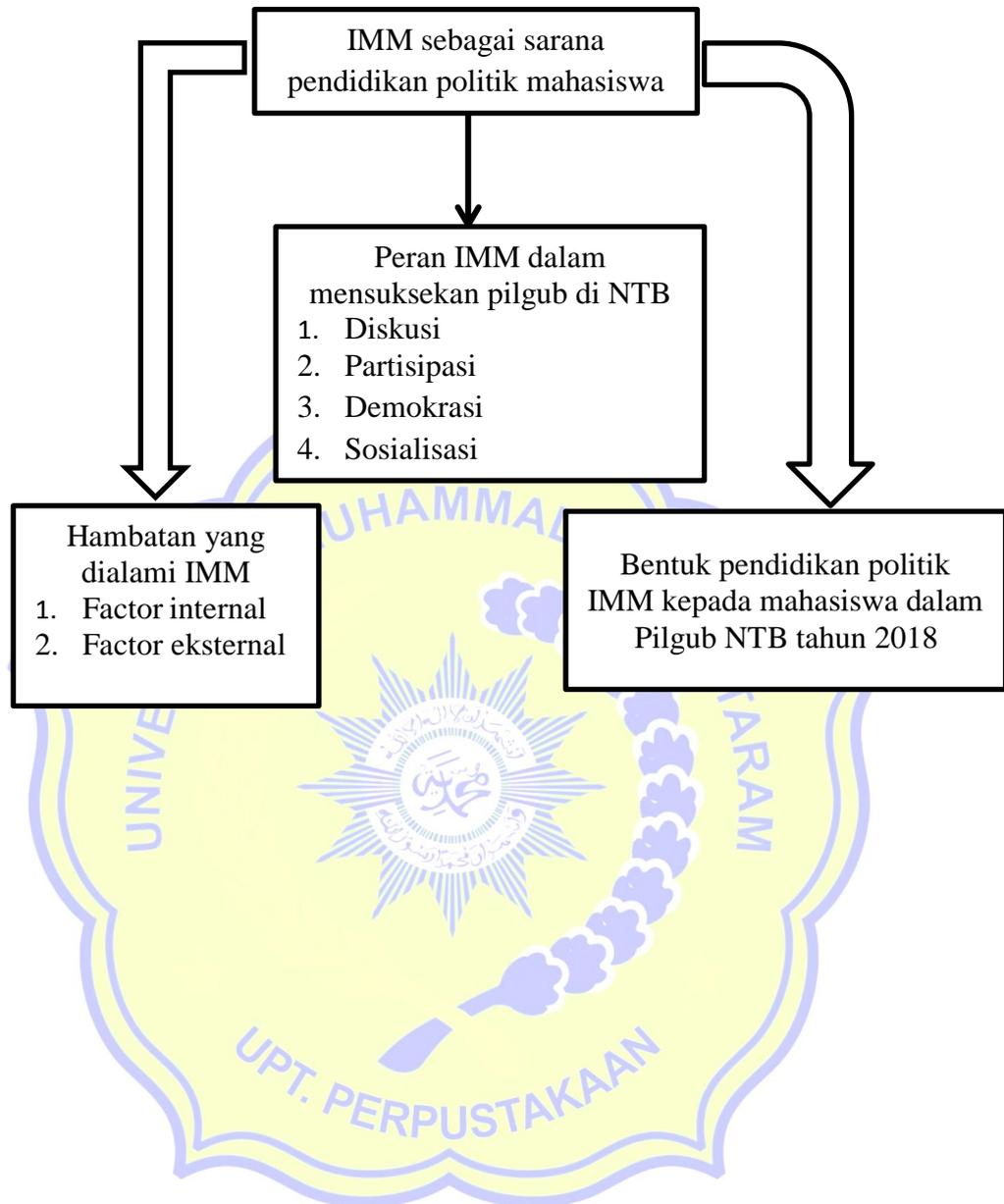
Corak gerakan IMM tidak jauh berbeda dengan spirit dan gerakan Muhammadiyah. Dimasa-masa awal, ternyata gerakan kemasyarakatan menjadi

ciri khas dari aktifitas kader IMM. Bedanya adalah IMM berbasis dikampus sebagai simpul-simpul kekuatan intelektual, sementara Muhammadiyah lebih heterogen terdiri dari berbagai latar belakang yang secara langsung memasyarakat dengan aktifitas pengabdianya. (Amirullah, 2016: 361-362)

Namun sebagaimana ayah dan anak gerakan keduanya selalu berorientasi pada cita-cita kemanusiaan. Beberapa fakta historis IMM melaporkan bahwa aktifitas awal dari kader-kader IMM banyak bersentuhan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dengan berbasiskan pada kekuatan diskursus intelektual di berbagai universitas di Yogyakarta. Artinya sejak awal kelahirannya secara langsung IMM tidak bersentuhan dengan dinamika politik, pembuatan jabatan dan kekuasaan, tapi sejak awal IMM disebarkan dengan dinamika dan trafiksi intelektualisme, dan humanisme. Namun secara teoritis-Normatis-ideologi IMM memang disiapkan sebagai kekuatan intelektual yang diharapkan bisa menjawab persoalan internal dan persoalan eksternal (umat Islam, bangsa dan negara serta persoalan kemanusiaan seluruhnya). (Amirullah, 2016:361-362)

Jika dilihat dari kursus tentang IMM khususnya nalar politik IMM sebagai kekuatan intelektual relatif sangat sepih diperdebatkan atau didialogkan dalam bentuk tulisan, jika dibandingkan dengan wacana relasi Muhammadiyah dan politik. Sehingga wajar saja dikalangan kader IMM sendiri terjadi perlambatan pemikiran (hususnya tentang politik) untuk tidak menyebut matinya nalar intelektual. (Amirullah, 2016:361-362).

## 2.8 Kerangka berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengankata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. (Sugiono, 2006). Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang Peran Pendidikan Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dalam Pilgub NTB Tahun 2018 (Study Kasus DPD IMM NTB)

Jenis penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (2012: 26), mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (2001: 21), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah,

dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil penulis adalah di dewan pengurus daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (DPD IMM) Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena penulis tertarik dengan Peran pendidikan politik kebangsaan oleh dewan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (DPD IMM). Dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (NTB). Sejauh mana peran dewan pengurus daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (DPD IMM) terkait politik kebangsaan khusus dalam pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tahun 2018 (NTB).

### **3.3 Informan Penelitian.**

Adapun informan dalam penelitian yang perlu dilakukan antara lain yaitu:

a. Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah dijadikan sampel.

1. DPD IMM NTB Tahun 2016/2018
2. Alumni DPD IMM NTB
3. Cabang IMM Kota Mataram Tahun 2018

- b. Penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan/narasumbernya yakni individu yang pernah mendapat atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan DPD-IMM NTB
- c. Jumlah dari informan juga dibatasi sebanyak 10 orang. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh beberapa tokoh penelitian komunikasi bahwa informan dalam sebuah penelitian berjenis kualitatif adalah 10 orang saja. (Burhan Bungin. 2001:43).

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Lofland dalam Moleong (2006:157) jenis data yang digunakan penelitian dalam penelitian deskripsi kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain jenis data yang Akan digunakan dalam penelitian mengenai peran pendidikan politik kebangsaan IMM dalam pilgub NTB, khususnya DPD IMM NTB.

#### **a. Data Primer**

Menurut sugiyono (2012:139) menjelaskan sumber primer adalah sebagai berikut: “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuensioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini berkaitan dengan realitas yang ada di kota Mataram provinsi NTB, yaitu menyangkut peran pendidikan politik kebangsaan oleh DPD IMM NTB dalam pilgub NTB.

b. Data Skunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut: “sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti data bahan-bahan laporan atau arsip-arsip surat dokumen yang tersedia pada instansi yang terkait data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari organisasi, lampiran-lampiran dari badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan dewan pimpinan daerah ikatan mahasiswa Muhammadiyah Mataram (DPD IMM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

### 3.5 Instrumen Data

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan “*purposive sampling*” yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto, 2010:34). Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah, ikatan mahasiswa Muhammadiyah Mataram (IMM).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Kumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah.

1. Observasi (pengamatan).

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan masalah untuk mendapatkan data pelengkap (Kartono, 2008:157). Observasi ini bisa dikatakan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melihat atau menjau lokasi penelitian untuk melihat secara langsung potensi-potensi yang ada tetapi belum dimanfaatkan, serta mencari permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dari potensi-potensi terkait dengan pengelolaan.

2. Interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan informan, pelaksanaannya bisa secara langsung bertatap mata maupun lewat media seperti telepon, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pokok persoalan yang diteliti (Kartono, 2008:187).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung. Bertanya yang dilakukan seseorang peneliti kepada seseorang secara kompeten.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu polah untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur baik berupa dokumentasi kegiatan, data tablek gambar, serta sumber-sumber lain yang relevan dan terkait permasalahan dalam penelitian. Data tersebut meliputi semua data berkaitan dengan peran pendidikan politik kebangsaan oleh Dewan Perwakilan Daerah ikatan mahasiswa muhammadiyah mataram dalam, pemilihan gubernur NTB pada tahun 2018.

#### 3.7 Tehnik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian digunakan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran pendidikan politik kebangsaan dalam pilgup NTB tahun 2018. Teknik pengelolaan data yang digunakan analisis deskripsi. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh aspek-aspek dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data miles, huberman data yang dikumpulkan dalam bentuk trasnkrip dari hasil rekaman dan catatan reflektif untuk memberikan gambaran suasana, sikap, dan emosi dari responden, kemudian dilakukan dengan editing. Data dikelompokkan dalam unik kecil dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu. Unik-unik tersebut berupa kata, kalimat atau paragraf atau bagaimana dari data yang mempunyai makna tersendiri. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara system matis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan dapat dipahami. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (2007:16).

1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan dirinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data yang akan di melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya adalah, mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya dan mencari yang diperlukan.

2. Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mengajikan data penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mengajikan, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusiondrawing* (verifikasi)

Langkah ketiga adalah analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bilah tidak ditemukan bukti yang falid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka keispulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel. Dalam penelitian kulitatif ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data diantaranya reduksi data, penyajian verifikasi data.

